

## LEMBAR VIII

**TOPIK : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN HUKUM**

**LBH APIK : \_\_\_\_\_**

### ***A. Verifikasi dan Akreditasi Bantuan Hukum***

**1. Status LBH APIK dalam program bankum pemerintah (dilingkari yang jawaban sesuai situasi masing-masing LBH APIK):**

**a. Terakreditasi:**

- 1) A, B, C, (lingkari)
- 2) Sejak tahun \_\_\_\_\_

**b. Tidak lolos akreditasi, karena: (dapat dipilih lebih dari satu dan ditambah penjelasan lainnya)**

- 1) Status hukum organisasi belum ada, jelaskan hambatannya \_\_\_\_\_
- 2) Status hukum organisasi belum dua tahun
- 3) Jumlah kasus belum memenuhi syarat, jelaskan jumlah kasus saat ini dan hambatannya :  
\_\_\_\_\_

4) Jumlah advokat tidak memenuhi syarat, sebutkan jumlah advokat saat ini dan hambatannya :

\_\_\_\_\_

5) Tidak memiliki paralegal, jelaskan : \_\_\_\_\_

6) Persoalan lain, sebutkan \_\_\_\_\_

c. Tidak pernah/belum pernah mendaftar, karena : \_\_\_\_\_

d. Pernah lolos, namun tidak lolos di periode ini, karena \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Apa saja hambatan dalam menaikkan status akreditasi?**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Persoalan proses akreditasi bankum yang sering menjadi penghambat: (dapat dipilih lebih dari satu)**

a. Informasi dari pemerintah terlambat, jelaskan \_\_\_\_\_

b. Informasi dari pemerintah tidak lengkap, jelaskan \_\_\_\_\_

c. Kesulitan pendaftaran menggunakan sistem internet, jelaskan \_\_\_\_\_

d. Sistem administrasi yang rumit, sebutkan \_\_\_\_\_

e. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

**4. Bagaimana Pemerintah merespon LBH APIK apabila terdapat keluhan terhadap proses verifikasi dan akreditasi Bantuan Hukum? Bagaimana feedbacknya?**

\_\_\_\_\_

5. Bagaimana seharusnya sistem akreditasi dan verifikasi yang anda rekomendasikan?

---

**B. Skema Anggaran Bantuan Hukum**

1. Apakah anggaran bantuan hukum telah memadai untuk penanganan kasus kekerasan berbasis gender?

a. Litigasi

- Memadai
- Tidak memadai, jelaskan \_\_\_\_\_

b. Non Litigasi

- Memadai
- Tidak memadai, jelaskan \_\_\_\_\_

2. Apakah anggaran bantuan hukum telah berperspektif korban kekerasan berbasis gender?

- Sudah
  - Belum, jelaskan kebutuhan yang bagaimana tidak terpenuhi \_\_\_\_\_
- 

3. Apakah skema anggaran bankum tersebut berpengaruh terhadap LBH APIK (jelaskan semua item)

- a. dalam hal efektivitas penanganan kasus, jelaskan \_\_\_\_\_  
(perlu diberi contoh biar lebih jelas maksudnya)

- b. dalam jangkauan penanganan kasus, jelaskan \_\_\_\_\_
- c. dalam kelembagaan, jelaskan \_\_\_\_\_
- d. lainnya, jelaskan \_\_\_\_\_

**4. Apakah skema anggaran bantuan hukum telah mengakomodasi kebutuhan paralegal dalam (jelaskan semua item):**

- a. Penangan kasus: \_\_\_\_\_
- b. Peningkatan kapasitas \_\_\_\_\_
- c. Pembentukan paralegal baru \_\_\_\_\_

**d. Apa saja yang perlu dicover oleh dana bantuan hukum namun belum disediakan dalam skema anggaran bankum saat ini?**

\_\_\_\_\_

***C. Penerima Bantuan Hukum***

**1. Apakah kategori penerima bantuan hukum yang telah ditetapkan oleh UU Bankum dan Peraturan turunan di bawahnya telah mengcover semua kategori korban kekerasan berbasis gender?**

- a. Iya
- b. Belum, jelaskan kategori korban yang tidak tercover dan mengapa?

\_\_\_\_\_

**2. Apa saja yang seringkali menghambat korban kekerasan berbasis gender dalam mendapatkan bantuan hukum menggunakan anggaran bantuan hukum?**

---

**3. Bagaimana pengalaman LBH APIK dalam mengatasi hambatan tersebut? Best practices**

---

**4. Apa yang menurut anda perlu diubah dalam kategori/syarat penerima bankum?**

---

#### ***D. Sistem Administrasi Bankum***

**1. Menurut anda, bagaimana sistem pelaporan bankum saat ini?**

- a. Mudah
- b. Sedang, namun masih ada persoalan
- c. Menyulitkan

**2. Jika jawaban anda di pertanyaan no. 1 adalah (b) sedang, namun masih ada persoalan atau (c) menyulitkan, apa persoalan yang dihadapi? (dapat memilih lebih dari satu)**

- a. Sidbankum, jelaskan \_\_\_\_\_
- b. Jaringan internet
- c. Petugas Kanwil Kumham berbeda-beda informasinya
- d. Tenggat waktu laporan, jelaskan \_\_\_\_\_
- e. Syarat administrasi rumit, jelaskan \_\_\_\_\_
- f. Lainnya, sebutkan \_\_\_\_\_

**3. Apakah sistem pelaporan bankum tersebut berpengaruh terhadap LBH APIK terhadap:**

- a. efektivitas penanganan kasus, jelaskan \_\_\_\_\_
- b. jangkauan penanganan kasus, jelaskan \_\_\_\_\_
- c. status akreditasi berikutnya, jelaskan \_\_\_\_\_
- d. alokasi anggaran periode berikutnya, jelaskan \_\_\_\_\_
- e. Lainnya, jelaskan \_\_\_\_\_

**4. Bagaimana sistem kontrak dalam program bankum menurut anda selama ini?**

- a. Sudah baik
- b. Sudah baik, namun masih ada persoalan. Sebutkan: \_\_\_\_\_
- c. Kurang baik, jelaskan \_\_\_\_\_

**5. Bagaimana seharusnya sistem kontrak tersebut diperbaiki?**

\_\_\_\_\_

## **E. Praktek Baik**

Berikan informasi anda praktek baik terkait program bankum

- Profil penerima bantuan hukum dan apa kasus mereka dibuat bagan (misalnya dikelompokkan: ibu rumah tangga miskin, yang masuk kriteria miskin APIK dll) ➔ untuk melihat apakah ada dampak dari adanya program bankum pada concern kita pada BHGS